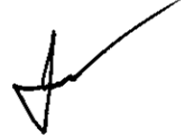

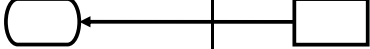
	<p align="center">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	009/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPP/06/2020
		Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center">Capt. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>

PENERBITAN JURNAL PENELITIAN

ISO 9001:2015

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang perubahan atas ketentuan lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya; 12. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen; 14. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan 181; 16. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 17. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 	<p>Cara Mengatasi :</p> <p>Dilakukan kegiatan penerbitan jurnal penelitian sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <div data-bbox="925 922 1372 1121" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>
--	---

Keterkaitan : 1. Pedoman Mutu Polteknepel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.	Peralatan : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Alat tulis Kantor.
Peringatan : Apabila SOP penerbitan jurnal penelitian tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	

SOP PENERBITAN JURNAL PENELITIAN							
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		KAMPUS/LEMBAGA YANG DIPILIH	PENELITI/ PENGABDI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan pemilihan jurnal			Artikel	3 Hari	Laporan	Hard Copy dan Soft Copy
2	Mengirim jurnal penelitian dan mengikuti alur publikasi			Artikel	1-15 hari	Jurnal	Hard Copy dan Soft Copy

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENERBITAN JURNAL PENELITIAN

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	